



## Analisis Daya Saing Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Guntur Aulia Akbar<sup>1\*</sup>, Saidin Nainggolan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [gunturauliaakbar25@gmail.com](mailto:gunturauliaakbar25@gmail.com)

**Abstract.** Independent plantations are a favorite in the Jambi Regional economy, as they are a source of economic growth, employment, exports, and foreign exchange for the region. Despite their relatively low productivity, oil palm plantations in Jambi Province have a major competitive advantage compared to other commodities. This study aims to describe, analyze competitiveness, analyze policy impacts, and conduct sensitivity tests on independent oil palm plantations. The research location was in Merlung District, selecting three sample villages: Tanjung Paku Village, Merlung Village, and Lubuk Terap Village purposively, with a total sample of 43 farmers. The data analysis method used the (PAM) method. The results of the analysis show that independent farmers still have relatively low productivity. The DRCR value is 0.379 ( $< 1$ ) and the PCR value is 0.368 ( $< 1$ ) which indicates savings in the use of domestic resources by 37.9% and 36.8%. These results indicate a comparative and competitive advantage. The divergence impact shows a negative impact, meaning that government policies are not distorted properly, as indicated by an NPCI value of 1.18 ( $> 1$ ) and an NPCO value of 0.87 ( $< 1$ ). Sensitivity tests show that independent oil palm plantations still have competitiveness ( $< 1$ ), despite experiencing policy distortions such as input price increases (11% and 25%) and a decrease in FFB prices (45%).

**Keywords:** Comparative; Competitive; Competitiveness; Private Prices; Social Prices.

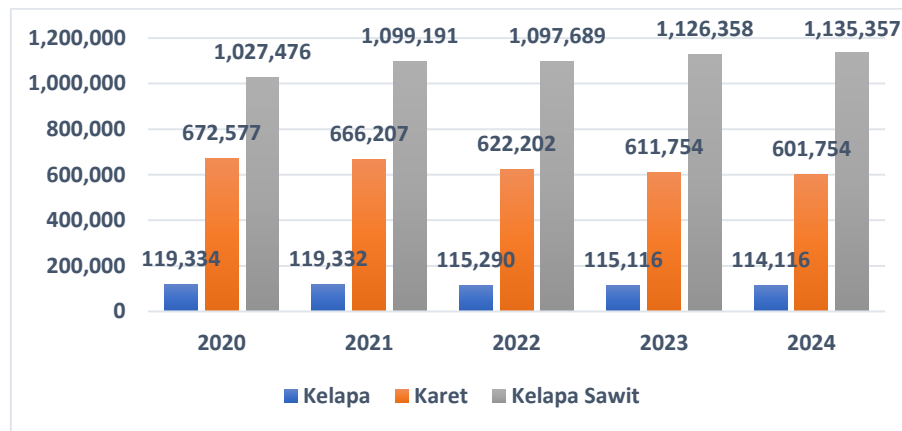
**Abstrak.** Perkebunan pola swadaya termasuk primadona dalam perekonomian Daerah Jambi, karna sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan sumber devisa bagi daerah. Perkebunan sawit Provinsi Jambi walaupun produktivitasnya tergolong rendah namun, memiliki daya saing yang utama dibandingkan komoditas yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis daya saing, menganalisis dampak kebijakan, dan uji sensitivitas pada perkebunan kelapa sawit pola swadaya. Lokus penelitian dilakukan di Kecamatan Merlung dengan mengambil 3 desa sampel yaitu Desa Tanjung Paku, Desa Merlung, dan Desa Lubuk Terap secara *purposive*, dengan jumlah sampel 43 petani. Metode analisis data menggunakan metode (PAM). Hasil analisis menunjukkan petani swadaya masih memiliki produktivitas tergolong rendah. Nilai DRCR sebesar 0,379 ( $< 1$ ) dan nilai PCR sebesar 0,368 ( $< 1$ ) yang mengindikasikan adanya penghematan penggunaan sumber daya domestik sebesar 37,9% dan 36,8%. Hasil ini menunjukkan adanya keunggulan komparatif dan kompetitif. Dampak divergensi menunjukkan dampak negatif yang artinya kebijakan pemerintah tidak terdistorsi dengan baik, ditunjukkan dengan nilai NPCI sebesar 1,18 ( $> 1$ ), dan nilai NPCO sebesar 0,87 ( $< 1$ ). Uji sensitivitas menunjukkan perkebunan kelapa sawit pola swadaya masih memiliki daya saing ( $< 1$ ), meskipun mengalami distorsi kebijakan seperti skenario kenaikan harga input (11 % dan 25 %) dan penurunan harga TBS (45 %).

**Kata kunci:** Daya Saing; Harga Privat; Harga Sosial; Komparatif; Kompetitif.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkebunan sawit adalah sektor unggulan yang utama bagi Daerah Jambi. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas unggulan saat ini di Indonesia. Pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit sejalan dengan meningkatnya minat dalam pengelolaan sektor ini (Nadia *et al.*, 2021). Perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi sumber devisa bagi negara (Ningsih *et al.*, 2019). Komoditas kelapa sawit di Indonesia di dominasi oleh beberapa Provinsi salah satunya salah satu yang terbesar adalah Provinsi Jambi. Perkebunan sawit merupakan sumber pertumbuhan ekonomi di berbagai Daerah di Indonesia. Provinsi Jambi menjadi penghasil kelapa sawit yang termasuk kedalam 10 provinsi teratas di

Indonesia. Pendapatan yang di miliki Provinsi Jambi sebagian besar besumber dari sektor perkebunan, di mana komoditas kelapa sawit tetap menjadi yang utama (Nadia *et al.*, 2021). Luas lahan tanaman perkebunan Provinsi Jambi (ha) tahun 2020-2024 pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Luas Areal Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi (ha), 2020-2024.

Provinsi Jambi memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung, serta ketersediaan tenaga kerja yang berlimpah, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kelapa sawit. Data Disbun Provinsi Jambi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas areal kelapa sawit saat ini sekitar 70,47% adalah milik perkebunan rakyat, yang berkontribusi sekitar 57,10% terhadap total produksi sawit di daerah tersebut (Alamsyah *et al.*, 2019). Provinsi Jambi pada 2024 diperkirakan menghasilkan kelapa sawit sebanyak 2.233.230 ton. Hasil produksi kelapa sawit tersebut diperoleh dari lahan seluas 1.135.357 ha yang sebagian besarnya merupakan perkebunan swadaya seluas 772 ribu hektar pada tahun 2024. Pertumbuhan luas lahan swadaya tidak sebanding dengan peningkatan produktivitasnya, di mana produktivitas lahan swadaya hanya berkisar antara 2,5 hingga 3 ton per hektar, sedangkan perkebunan besar swasta mencapai sekitar 3,5 hingga 4 ton per hektar (Triningsih *et al.*, 2024).

Luas lahan dan produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi sebagian besarnya dihasilkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas lahan 155.497 ha dan produksi 328.437 ton CPO pada tahun 2024. Luas lahan perkebunan kelapa sawit ini didominasi oleh beberapa Kecamatan salah satunya Merlung yang menjadi Kecamatan dengan luas lahan terluas ketiga sebesar 12.393 ha yang sebagian besarnya dimiliki oleh petani swadaya dengan persentase 61,61% atau 7.637 ha, namun hasil produksinya yang dihasilkan Kecamatan Merlung merupakan salah satu yang terendah yang hanya sebesar 15.285 ton CPO atau hanya 1,23 ton per hektar jauh dibawah standar 2,5 hingga 3 ton per hektar untuk kebun swadaya. Keterbatasan produktivitas ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan modal dan penguasaan teknologi, yang mengakibatkan praktik pertanian di perkebunan rakyat sering kali ditandai

dengan jarak tanam yang tidak teratur serta kurangnya perencanaan yang sistematis dalam penempatan tanaman sesuai dengan umur tanaman (Yanita *et al.*, 2023).

Potensi produktivitas kelapa sawit di Provinsi Jambi masih tinggi, karna produktivitas saat ini masih jauh di bawah potensi yang ada. Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, memiliki rata-rata produktivitas perkebunan rakyat di Kabupaten Tebo sebesar 13,2 ton/ha/tahun, Kabupaten Merangin 14,4 ton/ha/tahun, Kabupaten Batanghari 11,7 ton/ha/tahun, Kabupaten Muaro Jambi 16,3 ton/ha/tahun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 12,9 ton/ha/tahun (Napitupulu *et al.*, 2020). Pola swadaya, produksi tandan buah segar (TBS) tercatat sebesar 14,6 ton/ha/tahun. Menurut Sukarman *et al* (2024) menjelaskan jika kelapa sawit memiliki genetik dan agronomi yang optimal, maka produktivitas yang dapat dicapai sebesar 31,02 – 35 ton TBS/ha/tahun. Menurut Nainggolan & Fitri (2024) mengindikasikan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Jambi masih berada pada tingkat efisiensi yang rendah. Nilai *Technical Efficiency* (TE) di Kabupaten Tebo tercatat 0,561; Merangin 0,587; Batanghari 0,523; Muaro Jambi 0,6173; dan Tanjung Jabung Barat 0,535. Secara umum, rata-rata TE pada perkebunan swadaya sebesar 0,516, sedangkan pola kemitraan sedikit lebih tinggi yaitu 0,627. Napitupulu *et al* (2020) menjelaskan walaupun *Technical Efficiency* (TE) diberbagai daerah dalam provinsi Jambi tergolong rendah, namun masih memiliki daya saing yang tergolong kuat, baik daya saing komparatif maupun kompetitif

Kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, dan penentuan harga TBS di Kecamatan Merlung menyebabkan terjadinya fenomena perbedaan harga privat dan sosial pada input produksi dan TBS. Petani mendapatkan input produksi seperti pupuk dan obat-obatan dengan harga yang lebih tinggi dengan selisih 26 – 50 % lebih tinggi dibandingkan harga sosial. Disbun Tanjung Jabung Barat tahun 2025 menetapkan harga TBS pada tingkat petani berkisar dari Rp.2.700 – Rp. 2.800, harga jual TBS ini justru lebih rendah dibandingkan harga sosial dengan selisih 21-26 %. Alamsyah *et al.*, (2019) mencatat adanya selisih harga jual TBS antara Rp 300 hingga Rp 500/kg antara petani swadaya dan petani plasma di Provinsi Jambi (Varwasih *et al.*, 2023). Rendahnya harga TBS ini dipengaruhi oleh kualitas bibit yang digunakan, jumlah pupuk yang diterapkan, serta tujuan pemasaran TBS, yang semuanya berkontribusi signifikan terhadap harga yang diterima oleh petani sawit swadaya (Alamsyah *et al.*, 2019). Tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual TBS nantinya akan mempengaruhi efisiensi produksi, keuntungan, dan daya saing petani swadaya.

Kondisi yang terjadi dilapangan sangat mempengaruhi daya saing terutama petani swadaya yang mengelola kebunnya dengan modal sendiri. Jumlah petani swadaya yang banyak pada Kecamatan Merlung namun memiliki produktivitas yang sangat rendah menunjukan

adanya kesenjangan antara potensi dengan kondisi aktual. Kebijakan pemerintah juga memberikan dampak terhadap perbedaan input dan output pada tingkat harga privat dan sosial yang mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit swadaya. Analisis daya saing perkebunan kelapa sawit swadaya dengan menggunakan pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM) memungkinkan untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dampak kebijakan, serta uji sensitivitas terhadap ketahanan daya saing saat terjadi perubahan harga. Penelitian ini memiliki kebaharuan pada penentuan input *tradable* dan *non tradable*, serta penentuan harga privat dan sosial yang mengikuti harga terbaru. Hasil analisis ini nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi petani dan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit swadaya yang banyak dan luas baik di Kecamatan Merlung ataupun ditempat lain.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Daya Saing**

Menurut Porter (1990), daya saing ditentukan oleh kemampuan suatu entitas untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dan mempertahankan posisinya di pasar dalam menghadapi kompetisi. Porter (1990), juga menjelaskan daya saing dapat diukur melalui produktivitas yang dapat dilihat dari besar input yang digunakan untuk menghasilkan satu output. Menurut Martin *et al* (1991), daya saing adalah kemampuan menjaga keuntungan dan bagian pasar, dengan kekuatan indikator daya saing adalah laba dari pangsa pasar. Sejalan dengan itu, Simanjuntak (1992), menyatakan bahwa daya saing adalah kapasitas seorang produsen menghasilkan barang dengan kualitas memadai dan biaya produksi rendah, sehingga harga pasar internasional dapat ditangani sambil tetap menguntungkan. Dengan demikian, produsen bisa bertahan dalam produksi (Soetriono, 2017).

### **Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif**

Menurut Heckscher & Ohlin (1933), menekankan bahwa keunggulan komparatif muncul akibat perbedaan kepemilikan sumber daya alam (*endowment factors*) seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan iklim di berbagai wilayah. *Social Profitability* (SP) merupakan keuntungan yang dihitung dengan menggunakan harga sosial yang mencerminkan nilai ekonomi riil dari sumber daya tanpa dipengaruhi oleh distorsi kebijakan maupun ketidaksempurnaan pasar. Menurut Porter (1985), keunggulan kompetitif dicapai ketika suatu organisasi mampu menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaing, baik melalui pengendalian biaya yang lebih rendah (*cost leadership*) maupun melalui diferensiasi produk (*differentiation*).

## **Dampak Kebijakan**

Menurut Monke & Pearson (1989) kebijakan pemerintah merupakan bentuk intervensi pada mekanisme pasar. Intervensi tersebut dilakukan melalui instrumen harga, subsidi, pajak, kuota, serta berbagai kebijakan non harga yang berpengaruh terhadap struktur insentif dan efisiensi ekonomi sektor pertanian (Pearson *et al.*, 2005). Monke & Pearson (1989) menjelaskan bahwa kebijakan output berkaitan dengan penetapan harga hasil produksi, seperti subsidi, pajak ekspor, atau tarif impor, yang mengakibatkan terjadinya selisih harga antara harga yang diterima petani pada harga privat dan harga sosial yang menggambarkan nilai ekonomi setelah terdampak kebijakan (Pearson *et al.*, 2005). Monke & Pearson (1989) mengungkapkan kebijakan pada sisi input mencakup intervensi pemerintah yang memengaruhi biaya faktor produksi, seperti subsidi, tarif impor, atau kebijakan nilai tukar (Pearson *et al.*, 2005). Monke & Pearson (1989) mengungkapkan bahwa kebijakan input–output menunjukkan dampak gabungan dari intervensi pemerintah pada kedua sisi baik input maupun output yang secara keseluruhan menentukan tingkat keuntungan privat, keuntungan sosial, keunggulan komparatif, dan kompetitif pada sistem usahatani (Pearson *et al.*, 2005).

## **Analisis Sensitivitas**

Menurut Gittinger (1986), analisis sensitivitas ini berfungsi untuk menilai sejauh mana hasil dari suatu kajian ekonomi atau finansial akan berubah apabila terjadi modifikasi pada asumsi-asumsi dasar, seperti harga input, harga output, atau tingkat produktivitas. Menurut Kadariah *et al* (2001), menjelaskan untuk menguji kelayakan pada proyek apabila terjadi perubahan pada variabel kunci dapat menggunakan analisis sensitivitas. Dalam konteks analisis kebijakan pertanian, Pearson *et al* (2005), menegaskan bahwa analisis sensitivitas berperan penting dalam mengidentifikasi variabel paling berpengaruh terhadap keunggulan komparatif maupun kompetitif suatu komoditas, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing. Soetriono (2017), mengemukakan bahwa analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi keunggulan komparatif dan kompetitif, dampak kebijakan dan usahatani jika mengalami perubahan harga.

## **Policy Analysis Matrix (PAM)**

Pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM) diperkenalkan oleh Monke & Pearson (1989) adalah suatu sistem analisis yang mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi biaya produksi dan penerimaan usahatani. Melalui pendekatan ini, kebijakan komoditas dan ekonomi makro dapat dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya kebijakan, sehingga memungkinkan untuk melakukan penilaian yang lebih mudah ditafsirkan (Soetriono, 2017). PAM menilai daya saing finansial, daya saing ekonomi, dan dampak kebijakan pemerintah

melalui tiga komponen utama: penerimaan, biaya, dan keuntungan. Monke & Pearson (1989), membedakan antara harga privat dan harga sosial serta mengukur besarnya transfer kebijakan input-output. Harga privat merupakan harga yang memang dibayarkan dan terima oleh petani, dimana harga ini menggambarkan harga yang sudah terkena distorsi kebijakan. Harga sosial atau harga bayangan merupakan harga asli input tanpa adanya distorsi kebijakan yang mempengaruhinya, untuk harga sosial barang *non tradable* mengikuti harga domestik, sedangkan harga input *tradable* akan mengikuti harga internasional (Monke & Pearson, 1989).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokus penelitian ini dilakukan pada 3 desa yaitu Desa Tanjung Paku, Desa Merlung, dan Desa Lubuk Terap, pada Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode penarikan sampel menggunakan Formula dan Taro Yamane yang dikenal dengan Metode Slovin, dengan presisi 15% dengan total keseluruhan petani sebanyak 1.329, didapat jumlah sampel sebanyak 43 petani yang diperoleh dengan menggunakan *Snowball Sampling*. Penentuan lokus penelitian ini dilakukan dengan sengaja atau (*puposive*) dengan pertimbangan perkebunan kelapa sawit yang luas namun produktivitasnya relatif rendah, terdapat selisih harga input dan TBS antara tingkat privat dan sosial, serta sebagian besar petaninya merupakan pola swadaya, sehingga menarik bagi peneliti untuk menganalisis daya saing petani swadaya di Kecamatan Merlung. Objek penelitian ini adalah petani swadaya yang melakukan pengelolaan kebunnya secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain dengan umur tanaman berkisar 8-25 tahun.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk menganalisis daya saing usaha, menganalisis dampak kebijakan pemerintah, dan menguji sensitivitas daya saing terhadap perubahan harga. Metode *Policy Analysis Matrix* (PAM), akan dikombinasikan dengan indikator *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) dan *Private Cost Ratio* (PCR) untuk mengukur tingkat daya saing, dikombinasikan juga dengan indikator dampak kebijakan, serta uji sensitivitas akan menggunakan simulasi kenaikan PPn 11%, pengurangan subsidi pupuk sebanyak 25%, dan larangan ekspor CPO yang menurunkan harga TBS dalam negeri sebesar 45%.

**Tabel 1.** Tabel *Policy Analysis Matrix* (PAM).

	<i>Revenue</i>	<i>Tradeable Input</i>	<i>Cost Non Tradable Input</i>	<i>Profit</i>
<i>Private Price</i>	A	B	C	$D = A - (B+C)$
<i>Social Price</i>	E	F	G	$H = E - (F+G)$
<i>Divergence</i>	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = D - H$

Sumber: Monke & Pearson, (1989)

Keterangan:

- A = Penerimaan petani pada harga asli
- B = Total biaya input *tradable* yang dinilai pada harga asli
- C = Total pengeluaran untuk input *non tradable* pada harga asli
- D = Total keuntungan yang dihitung pada harga asli
- E = Penerimaan petani pada harga bayangan
- F = Total biaya input *tradable* yang dinilai pada harga bayangan
- G = Total biaya input *non tradable* pada harga bayangan
- H = Total keuntungan yang dihitung pada harga bayangan
- I = Pengaruh kebijakan pada output
- J = Pengaruh kebijakan pada *input tradable*
- K = Pengaruh kebijakan pada input *non tradable*
- L = Pengaruh kebijakan terhadap keuntungan

Rumus:

**Indikator Keunggulan Komparatif :**

*Sosial Profitabilit (SP)* =  $E-(F+G)$  (SP > 0) layak secara finansial dan menguntungkan, (SP ≤ 0) berlaku sebaliknya.

*Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)* =  $G/(E-F)$  (DRCR < 1) memiliki keunggulan komperatif, (DRCR > 1) berlaku sebaliknya.

**Indikator Keunggulan Kompetitif :**

*Profitability Privat (PP)* =  $A-(B+C)$  (PP > 0) layak secara finansial dan menguntungkan, (PP ≤ 0) berlaku sebaliknya.

*Private Cost Ratio* (PCR) =  $C/(A-B)$  (PCR < 1) memiliki keunggulan komperatif, (PCR > 1) berlaku sebaliknya.

**Indikator Dampak Kebijakan :**

*Transfer Output* (TO) = A-E TO (+) harga privat output lebih tinggi dibandingkan harga sosial, TO (-) berlaku sebaliknya.

*Nominal Protection Coefficient Output* (NPCO) = A/E (NPCO > 1) harga output menyebabkan penerimaan meningkat, (NPCO < 1) berlaku sebaliknya.

*Transfer Input* (TI) = B-F TI (+) input *tradable* tidak terproteksi, TI (-) berlaku sebaliknya.

*Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) = B/F (NPCI > 1) kebijakan tidak bersifat proteksif, (NPCI < 1) berlaku sebaliknya.

*Transfer Faktor* (TF) = C-G TF (+) subsidi berdampak negatif pada input *non tradable*, TF (-) berlaku sebaliknya.

*Effective Protection Coefficient* (EPC) =  $(A-B)/(E-F)$  (EPC > 1) kebijakan efektif dalam protektif produksi, (EPC < 1) berlaku sebaliknya.

*Net Transfer* (NT) = D-H NT (+) usahatani mendapatkan surplus secara keseluruhan, NT (-) berlaku sebaliknya.

*Profitability Coefficient* (PC) = D/H (PC > 1) kebijakan memberikan insentif pada petani, (PC < 1) berlaku sebaliknya.

*Subsidy Ratio to Producer* (SRP) = L/E (SRP > 0) biaya produksi petani lebih rendah dari *opportunity cost*, (SRP < 0) berlaku sebaliknya.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Daerah Penelitian, Tahun 2025**

Perkebunan kelapa sawit swadaya di Kecamatan Merlung masih relatif bersifat konvensional. Informasi mengenai teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, hingga pemasaran umumnya diperoleh melalui komunikasi antar petani, pendampingan penyuluh pertanian, serta pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi tambahan. Petani swadaya disana menggunakan beberapa jenis bibit seperti Marihat, Topaz, PPKS, Tenera, dan Simalungun



yang termasuk dalam kategori bibit unggul, sedangkan Dampi tidak termasuk bibit unggul. Petani di daerah penelitian tidak jarang mengkombinasikan dua jenis bibit yang berbeda dalam satu lahan, dengan jarak tanam  $9\text{ m} \times 9\text{ m}$  dengan jumlah 125 btg/ha,  $9\text{ m} \times 8\text{ m}$  dengan 130 - 135 btg/ha, dan  $8\text{ m} \times 8\text{ m}$  dengan 150 btg/ha. Petani menggunakan pupuk beberapa jenis pupuk seperti Urea, KCL, NPK, dan Dolomit dengan dosis 1 - 2,5 kg/batang yang dilakukan 2 – 3 kali pemupukan. Obat-obatan yang digunakan petani disana seperti Gramaxone dan Rondap dengan dosis 2,5 - 3 liter/ha yang dilakukan 2 – 3 kali penyemprotan. Alat-alat yang digunakan petani di Kecamatan Merlung seperti cangkul, dodos, egrek, keranjang, tojok, dan gancu. Tenaga kerja yang digunakan petani swadaya terbagi menjadi TKDK dan TKLK, namun sebagian besar menggunakan TKLK dengan sistem borongan, mulai dari pemupukan, perawatan, hingga panen. Luas lahan petani swadaya memiliki rata-rata luas lahan 3,14 ha dengan produktivitas 15,2 ton/ha/tahun.

### **Policy Analysis Matrix (PAM)**

Penyusunan tabel PAM dilakukan dengan membandingkan penerimaan, biaya input yang terbagi menjadi input *tradable* dan *non tradable*, serta keuntungan yang diterima petani pada harga privat dan sosial. Selisih penerimaan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh nantinya akan menggambarkan dampak kebijakan dan distorsi pasar.

**Tabel 3.** Hasil *Policy Analysis Matrix* (PAM) di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

	<i>Cost</i>			<i>Profit</i>
	<i>Revenue</i>	<i>Tradeable Input</i>	<i>Non Tradeable Input</i>	
<i>Private Price</i>	42.270.022	2.593.703	14.616.726	25.059.593
<i>Social Price</i>	51.690.321	2.197.993	18.784.496	30.707.832
<i>Divergence</i>	-9.420.299	395.710	-4.167.770	-5.648.239

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)

Penerimaan petani pada harga privat mencapai Rp. 42.270.022/ha/tahun, yang menggambarkan total penerimaan yang diterima petani berdasarkan harga aktual. Pada tingkat harga privat tersebut, petani mengeluarkan biaya input *tradable* sebesar Rp. 2.593.703, sementara biaya input *non-tradable* tercatat sebesar Rp. 14.616.726. Selisih antara penerimaan dan total biaya tersebut menghasilkan *Private Profitability* (PP) sebesar Rp. 25.059.593/ha/tahun. Keuntungan ini relatif rendah jika dibandingkan penelitian Sianturi *et al* (2021) yang mendapatkan nilai PP sebesar Rp. 42.953.200 dan Aznur (2021) yang mendapatkan nilai PP sebesar Rp. 87.255.407. Monke & Pearson (1989) menjelaskan jika nilai (PP > 0) artinya sistem produksi tersebut memiliki keunggulan kompetitif dalam kondisi

kebijakan yang berlaku, dikarnakan layak secara finansial, memberi keuntungan pada harga aktual, dan terdapat insentif bagi produsen untuk terus memproduksi.

Penerimaan pada harga sosial tercatat sebesar Rp. 51.690.321/ha/tahun, yang mencerminkan penerimaan pada kondisi tanpa distorsi kebijakan. Biaya input *tradable* pada harga sosial sebesar Rp. 2.197.993, sedangkan biaya input *non-tradable* mencapai Rp. 18.784.496. Berdasarkan perhitungan tersebut, *Social Profitability* (SP) adalah sebesar Rp. 30.707.832/ha/tahun. Keuntungan ini relatif sedang jika dibandingkan penelitian Sianturi *et al* (2021) yang mendapatkan nilai PS sebesar Rp. 22.838.066 dan Aznur (2021) yang mendapatkan nilai PS sebesar Rp. 122.858.359. Monke & Pearson (1989) menjelaskan jika nilai (SP > 0) artinya komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif, dikarnakan efisien secara ekonomi, sumber daya domestik digunakan secara produktif, dan produksi memberi kontribusi positif terhadap pendapatan petani.

#### **Analisis Daya Saing Kelapa Sawit Swadaya di Daerah Penelitian, Tahun 2025**

Analisis daya saing ini mencakup keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang ditunjukkan dengan indikator *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) untuk komparatif yang menggunakan harga sosial, sedangkan indikator *Private Cost Ratio* (PCR) untuk kompetitif yang menggunakan harga privat.

**Tabel 4.** Indikator PCR Dan DRCR di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

No.	Indikator Kebijakan	Hasil	Keterangan
1	<i>Private Cost Ratio</i> (PCR)	0,3683	Memiliki Keunggulan Kompetitif
2	<i>Domestic Resource Cost Ratio</i> (DRCR)	0,3795	Memiliki Keunggulan Komparatif

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)

Nilai DRCR usahatani kelapa sawit di Kecamatan Merlung sebesar 0,3795 artinya untuk menciptakan satu unit nilai tambah output berdasarkan harga sosial, pemanfaatan faktor produksi domestik yang dibutuhkan hanya sekitar 37,9%. Dengan kata lain, dari setiap penerimaan Rp. 1.000 yang diperoleh, biaya input yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 379. Hal ini berarti pengeluaran pada tingkat harga sosial relatif lebih rendah dibandingkan nilai tambah yang dihasilkan, sehingga dari Rp1.000 penerimaan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 621 sebagai keuntungan ekonomi. Nilai DRCR sebesar 0,379 tergolong daya saing sedang, yang artinya produktivitas pada daerah penelitian cenderung rendah yang mengakibatkan biaya untuk menghasilkan satuan output meningkat, namun terbantu akibat biaya input pada harga sosial yang lebih rendah dan nilai jual TBS yang tinggi pada harga sosial, serta efisiensi dalam penggunaan modal, tenaga kerja, dan lahan yang dimiliki. Monke & Pearson, (1989)

menjelaskan rendahnya nilai DRCR menunjukkan produktivitas yang baik, harga input yang rendah dan output yang tinggi, serta efisiensi penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal tanpa adanya distorsi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya keunggulan komparatif dan berpotensi bersaing di pasar. Hasil ini sejalan dengan Sartika *et al* (2025) yang mendapat nilai DRCR sebesar 0,28 ( $< 1$ ), dan Ardelia *et al* (2026) yang mendapatkan hasil DRCR sebesar 0,82 ( $< 1$ ).

Keunggulan kompetitif dianalisis melalui nilai PCR, yang pada penelitian ini sebesar 0,368. Nilai tersebut menunjukkan untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah output pada harga privat, usahatani hanya membutuhkan sumber daya domestik sebesar 36,8 %. Artinya, setiap penerimaan sebesar Rp. 1.000 membutuhkan biaya input sekitar Rp. 368. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan pada tingkat harga privat relatif lebih rendah dibandingkan nilai tambah sehingga menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 632 disetiap penerimaan sebesar Rp. 1.000. Nilai PCR 0,368 tergolong daya saing yang sedang, yang artinya kebijakan berdampak negatif atau tidak adanya subsidi dan terhadap pajak pada input dan output pada petani swadaya sehingga menurunkan efisiensi produksi pada tingkat privat rendah yang disebabkan mahalnya input produksi pada harga privat, sedangkan harga jual TBS yang lebih rendah pada harga privat yang mengakibatkan biaya untuk menghasilkan satu output meningkat, hal ini dipengaruhi juga produktivitas yang rendah. Monke & Pearson, (1989) menjelaskan tingginya nilai PCR disebabkan distorsi kebijakan yang tidak berpihak pada petani, yang menyebabkan mahalnya harga input produksi, dan rendahnya harga output yang diterima petani, serta rendahnya efisiensi produksi petani. Nilai (PCR  $< 1$ ) menandakan bahwa petani swadaya memiliki keunggulan kompetitif, karena mampu membiayai faktor produksi domestik secara efisien dan bersaing pada harga pasar yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sianturi *et al* (2021) yang mendapat nilai PCR sebesar 0,1399 ( $< 1$ ), dan Ningsih *et al* (2019) yang mendapatkan hasil PCR sebesar 0,84 ( $< 1$ ).

Perkebunan kelapa sawit pola swadaya belum mencapai daya saing optimal karena sebagian petani masih menggunakan input yang kurang berkualitas, serta penggunaan input yang belum optimal mulai dari dosis dan waktu penggunaan (Muharani *et al.*, 2024). Petani juga ada yang menggunakan bibit tidak unggul dan melakukan kombinasi beberapa jenis bibit dalam satu lahan (Varina *et al.*, 2021). Sebagian kebun masih menunjukkan produktivitas di rendah kebun perusahaan akibat manajemen yang tidak tepat (Varina *et al.*, 2021). Petani masih menerima harga TBS yang belum sepenuhnya mencerminkan harga efisien karena posisi tawar dalam rantai pemasaran masih terbatas (Lifianthi & Oktarina, 2021). Sebagian hasil panen masih mengalami potongan harga akibat kualitas dan rendemen yang belum seragam (Nurjanah

*et al.*, 2022). Petani masih menanggung biaya produksi yang relatif tinggi karena tenaga kerja dan sarana produksi mendominasi struktur biaya (Syabawaihi *et al.*, 2025). Petani masih menghadapi keterbatasan akses pupuk bersubsidi sehingga biaya input meningkat (Fitri & Nainggolan, 2023). Distribusi pupuk yang belum optimal masih menimbulkan selisih antara harga privat dan harga sosial dalam analisis daya saing (Hendrawan *et al.*, 2024). Petani masih menunjukkan efisiensi teknis yang belum maksimal akibat keterbatasan manajerial dan akses modal (Junianto, 2025).

### **Analisis Dampak Kebijakan Kelapa Sawit Swadaya di Daerah Penelitian, Tahun 2025**

Analisis dampak kebijakan ini mencakup, kebijakan output yang mempengaruhi harga harga TBS, kebijakan input yang mempengaruhi harga input produksi seperti pupuk dan obat-obatan, serta kebijakan input-output yang mempengaruhi subsidi, pajak, proteksi yang mempengaruhi keuntungan.

**Tabel 5.** Indikator Dampak Kebijakan Output di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

No.	Indikator Kebijakan	Hasil	Keterangan
1	<i>Transfer Output</i> (TO)	-9.420.299 TO (-)	Harga output yang diterima petani lebih rendah dibanding harga sosial.
2	<i>Nominal Protection Coefficient On Output</i> (NPCO)	0,8177 NPCO < 1	Kebijakan belum bisa memproteksi harga output yang menyebabkan penerimaan petani berkurang.

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)

Nilai *Transfer Output* (TO) usahatani kelapa sawit di wilayah penelitian tercatat sebesar – Rp9.420.299. Angka negatif tersebut mengartikan harga TBS yang diterima petani atau harga privat lebih rendah dibandingkan harga sosialnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya beban kebijakan berupa pajak atau pungutan terhadap TBS yang secara tidak langsung ditanggung oleh petani sebagai produsen. Dengan kata lain, petani tidak memperoleh harga TBS yang optimal sesuai nilai ekonominya, sehingga keuntungan yang diperoleh belum maksimal. Hasil ini sejalan dengan Jawari *et al* (2017) dengan yang memperoleh TO sebesar – Rp. 6.909.408, dan penelitian Aznur (2021) yang mendapat TO sebesar – Rp. 70.442.489,. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Farita *et al* (2021) yang mendapat hasil TO sebesar Rp 12,880,106, yang menunjukkan harga TBS yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga sosial.

Perbandingan penerimaan TBS antara harga privat dan harga sosial digunakan untuk menghitung *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO). Hasil nilai NPCO sebesar 0,8177 (NPCO < 1). Nilai ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku cenderung bersifat disinsentif atau belum mampu memberikan perlindungan terhadap harga

TBS di tingkat produsen. Hasil penelitian sejalan dengan Jawari *et al* (2017) yang mendapat hasil NPCO sebesar 0,79 ( $\text{NPCO} < 1$ ) dan Sartika *et al* (2025) yang mendapat hasil NPCO sebesar 0,7876 ( $\text{NPCO} < 1$ ) yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak pada perlindungan harga TBS produsen. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Ardelia *et al* (2026) yang mendapat nilai NPCO sebesar 1,18 ( $\text{NPCO} < 1$ ), yang artinya kebijakan pemerintah sudah memberikan perlindungan harga output produsen.

**Tabel 6.** Indikator Dampak Kebijakan Input di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

No	Indikator Kebijakan	Hasil	Keterangan
1	<i>Transfer Input</i> (TI)	Rp. 395.710 TI (+)	Belum terdapat proteksi terhadap input produksi tradable.
2	<i>Koefisien Proteksi Input Nominal</i> (NPCI)	1,18 NPCI > 1	Kebijakan belum bersifat protektif terhadap usahatani.
3	<i>Transfer Faktor</i> (TF)	-Rp.4.167.770 TF (-)	Adanya subsidi yang berdampak positif terhadap input <i>non tradable</i>

5. Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)

Perhitungan *Transfer Input* (TI) mendapatkan nilai sebesar Rp 395.710 ( $\text{TI} > 0$ ). Angka positif tersebut mengindikasikan bahwa biaya input yang dibayarkan petani lebih tinggi dibandingkan biaya pada harga sosial. Temuan ini sejalan dengan Sartika *et al* (2025) dengan nilai TI sebesar Rp. 116.915 ( $\text{TI} > 0$ ), dan Ningsih *et al* (2019) dengan hasil temuan TI sebesar 98.000 ( $\text{TI} > 0$ ). Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Manik *et al* (2019) dengan nilai – Rp. 8.510.093 ( $\text{TI} < 0$ ) yang mengartikan bahwa biaya input pada harga privat justru lebih rendah dibandingkan harga sosial.

Hasil ini menunjukkan nilai NPCI yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 1,18 ( $\text{NPCI} > 1$ ). Nilai tersebut menandakan kebijakan pemerintah belum memberikan perlindungan terhadap harga input *tradable*, khususnya pupuk dan obat-obatan, di bawah harga efisiennya. Dengan kata lain, petani belum memperoleh manfaat subsidi input secara optimal, sehingga biaya input yang ditanggung masih relatif tinggi. Hasil ini sejalan dengan Ningsih *et al* (2019) dengan hasil NPCI sebesar 1,02 ( $\text{NPCI} > 1$ ) dan Jawari *et al* (2017) dengan hasil NPCI sebesar 1,08 ( $\text{NPCI} > 1$ ), yang menyatakan bahwa  $\text{NPCI} > 1$  mencerminkan tidak adanya proteksi harga input *tradable* di pasar domestik. Namun hasil penelitian Manik *et al* (2019) mendapat hasil yang tidak sejalan dengan nilai NPCI sebesar 0,71 ( $\text{NPCI} < 1$ ), yang mencerminkan adanya ada proteksi harga input *tradable* dipasar domestik.

Petani selain menggunakan input *tradable*, petani juga memanfaatkan input *non-tradable* seperti tenaga kerja, lahan, peralatan, serta faktor domestik lainnya. Intervensi pemerintah terhadap input *non-tradable* dianalisis melalui nilai *Transfer Faktor* (TF). Hasil analisis

menunjukkan nilai TF sebesar -Rp. 4.167.770/ha/tahun. Nilai negatif tersebut mengindikasikan adanya subsidi pemerintah terhadap penggunaan input *non-tradable* pada di daerah penelitian. Hasil ini sejalan dengan Sartika *et al* (2025) dengan nilai TF sebesar – Rp. 14.616.989, dan Ningsih *et al* (2019) yang mendapatkan nilai TF sebesar - Rp. 953.863,12 yang menunjukkan biaya input *non tradable* lebih rendah dibandingkan harga sosial karna adanya subusidi. Hasil ini tidak sejalan dengan Ardelia *et al* (2026) dengan nilai TF sebesar Rp. 36.878,47 yang menunjukkan tidak adanya subsidi terhadap input *non-tradable*.

**Tabel 7.** Indikator Dampak Kebijakan Input-Output di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

No.	Indikator Kebijakan	Hasil	Keterangan
1	<i>Effective Protection Coefficient</i> (EPC)	0,8016 EPC < 1	Kebijakan pemerintah secara simultan tidak memberi proteksi kepada produksi kelapa sawit dalam negeri.
2	<i>Net Transfer</i> (NT)	-5.648.239 NT (-)	Usahatani tidak mendapatkan surplus secara keseluruhan, justru mengurangi surplus yang seharusnya .
3	<i>Profitability Coefficient</i> (PC)	0,816 PC < 1	Kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif kepada petani.
4	<i>Subsidi Ratio to Producer</i> (SRP)	-0,109 SRP < 0	Petani mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari <i>opportunity cost</i> .

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)

Perbandingan antara nilai tambah pada harga privat dan harga sosial digunakan untuk menghitung nilai EPC. Indikator EPC mencerminkan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu melindungi produksi dalam negeri. Hasil analisis menunjukkan nilai EPC sebesar 0,8016 (EPC < 1), yang berarti kebijakan pemerintah belum efektif dalam melindungi produksi kelapa sawit dalam negeri. Kondisi ini terjadi akibat kombinasi disinsentif pada TBS dan tingginya biaya input tradable. Hasil ini sejalan dengan Sartika *et al* (2025) dengan hasil EPC sebesar 0,77 (EPC < 1) dan Aznur (2021) dengan nilai EPC sebesar 0,93 (EPC < 1), yang menunjukkan kebijakan pemerintah belum efektif dalam memberikan perlindungan pada produksi domestik. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Ardelia *et al* (2026) EPC sebesar 1,18 (EPC > 1), yang menunjukkan kebijakan pemerintah sudah memberikan perlindungan pada produksi kelapa sawit domestik.

Hasil analisis menunjukan nilai *Net Transfer* (NT) di daerah penelitian sebesar – Rp.5.648.239 (NT < 0). Nilai negatif tersebut dapat diartikan bahwa produsen tidak memperoleh tambahan surplus akibat kebijakan input maupun output yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan Sartika *et al* (2025) yang menemukan nilai NT sebesar – Rp. 4.641.705 (NT < 0), dan Aznur (2021) dengan hasil NT sebesar – Rp. 35.602.957 (NT < 0), yang menunjukkan tidak adanya surplus yang diperoleh petani sebagai dampak kebijakan pemerintah, justru

menghilangkan surplus yang seharusnya diperoleh petani. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Ardedia *et al* (2026) dengan NT sebesar Rp. 11.093.692 ( $NT > 0$ ), dan Sianturi *et al* (2021) yang mendapatkan nilai NT sebesar Rp. 20.115.134 ( $NT > 0$ ) yang menandakan adanya surplus yang diterima petani sebagai dampak kebijakan pemerintah.

Keuntungan privat lebih rendah dibandingkan keuntungan sosial yang didapat oleh petani di daerah penelitian ditunjukkan oleh nilai *Profitability Coefficient* (PC) sebesar 0,816 ( $PC < 1$ ). Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah masih memberikan insentif kepada produsen. Hasil ini sejalan dengan Ningsih *et al* (2019) dengan nilai PC sebesar 0,66 ( $PC < 1$ ) dan Hermayanti *et al* (2013) dengan nilai sebesar 0,87 ( $PC < 1$ ) yang memiliki keuntungan privat dibawah keuntungan sosial. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Ardedia *et al* (2026) dengan temuan nilai PC sebesar 2,01 ( $PC > 1$ ), yang menunjukkan keuntungan privat lebih tinggi dibandingkan keuntungan sosial.

Kebijakan pemerintah menyebabkan pengeluaran biaya produksi petani yang lebih besar dibandingkan biaya sosial yang ditunjukkan oleh nilai *Subsidy Ratio to Producer* (SRP) sebesar -0,109 ( $SRP < 0$ ). Hasil ini sejalan dengan Manik *et al* (2019) yang memperoleh nilai SRP sebesar -0,31 ( $SRP < 0$ ), dan Aznur (2021) yang mendapat nilai SRP sebesar -0,09 ( $SRP < 0$ ) yang menunjukkan pengeluaran biaya produksi yang lebih besar dibandingkan biaya sosial yang diterima petani. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Ardedia *et al* (2026) dengan nilai SRP sebesar 0,18 ( $SRP > 0$ ), dan Jawari *et al* (2017) yang mendapatkan nilai SRP sebesar 0,25 ( $SRP > 0$ ), yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah membuat biaya produksi yang ditanggung petani lebih rendah dibandingkan biaya sosial.

### **Analisis Sensitivitas di Daerah Penelitian, Tahun 2025**

Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat saya saing saat terjadi perubahan harga input dan output. Uji sensitivitas ini menggunakan simulasi kejadian seperti kenaikan PPN menjadi 11%, pengurangan subsidi pupuk sebesar 25%, dan larangan ekspor CPO yang menurunkan 45% harga TBS.

**Tabel 8.** Hasil Uji Sensitivitas di Daerah Penelitian, Tahun 2025.

<b>Indikator</b>	<b>Normal</b>	<b>Input Naik 11%</b>	<b>Input Naik 25%</b>	<b>TBS Turun 45%</b>
<i>Private Cost Ratio</i> (PCR)	0,3683	0,3710	0,3745	0,7076
<i>Domestic Resource Cost Ratio</i> (DRCR)	0,3795	0,3814	0,3838	0,7160

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, (2025)*

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan biaya input tradable sebesar 11% baik pada harga privat maupun harga sosial, nilai *Private Cost Ratio* (PCR) dan *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) perkebunan kelapa sawit di Kecamatan

Merlung tetap berada di bawah satu ( $DRCR < 1$  dan  $PCR < 1$ ). Namun demikian, terjadi penurunan tingkat daya saing sebesar 0,50 % dan 0,73 %. Hasil ini menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit di daerah penelitian masih memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang relatif kuat serta tetap layak untuk dikembangkan.

Hasil analisis kenaikan harga pupuk sebesar 25% menyebabkan nilai  $DRCR$  dan  $PCR$  ( $< 1$ ), namun masing-masing mengalami penurunan daya saing sebesar 1,13 % dan 1,68 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekalipun biaya pupuk dan obat-obatan meningkat, usahatani kelapa sawit di Kecamatan Merlung tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik..

Hasil analisis penurunan harga TBS 45% menunjukkan bahwa nilai  $PCR$  dan  $DRCR$  ( $< 1$ ). Namun, daya saing usahatani kelapa sawit mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 88,67 % untuk  $DRCR$  dan 92,13 % dan untuk  $PCR$ . Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perubahan harga TBS yang bersifat ekstrem dapat menyebabkan perkebunan kelapa sawit swadaya kehilangan daya saing yang mencangkup komparatif dan keunggulan kompetitif.

Secara keseluruhan, hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan harga input maupun TBS memang memengaruhi nilai  $PCR$  dan  $DRCR$ . Hasil analisis sensitivitas pada seluruh skenario simulasi seperti kenaikan harga input sebesar 11%, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan sebesar 25%, serta penurunan harga TBS sebesar 45% mendapatkan nilai  $PCR$  dan  $DRCR < 1$ , yang artinya perkebunan kelapa sawit swadaya di Kecamatan Merlung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup kuat untuk bertahan dari berbagai perubahan situasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkebunan kelapa sawit swadaya di Kecamatan Merlung umumnya dikelola secara mandiri oleh petani dengan penerapan teknik budidaya yang masih sederhana, sehingga produktivitas kebun belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan modal, akses terhadap sarana produksi, kemampuan manajerial, serta praktik pemupukan yang masih berada di bawah dosis anjuran. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani tersebut masih memiliki tingkat daya saing yang cukup baik, yang tercermin dari nilai  $PCR$  sebesar 0,3683 dan  $DRCR$  sebesar 0,3795 ( $PCR$  dan  $DRCR < 1$ ), sehingga menunjukkan adanya keunggulan kompetitif maupun komparatif. Namun demikian, tingkat daya saing tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti rendahnya produktivitas, tingginya harga input, serta rendahnya harga TBS yang diterima



petani. Dari sisi kebijakan, nilai NPCO sebesar 0,8177 dan NPCI sebesar 1,18 mengindikasikan bahwa harga output yang diterima petani relatif lebih rendah, sementara harga input cenderung lebih tinggi, sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi petani swadaya. Selain itu, hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kenaikan harga input sebesar 11–25% serta penurunan harga TBS hingga 45% dapat menurunkan tingkat keuntungan dan daya saing usahatani, meskipun nilai PCR dan DRCR masih berada di bawah satu yang berarti usaha tersebut tetap memiliki keunggulan daya saing.

Upaya peningkatan daya saing perkebunan kelapa sawit swadaya memerlukan peran aktif petani dan dukungan kebijakan pemerintah. Petani perlu memperbaiki pengelolaan usaha tani melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, pengendalian hama secara efektif, serta pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efisien disertai peningkatan kapasitas melalui kegiatan penyuluhan. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan memperkuat dukungan melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, serta kebijakan yang mendukung ketersediaan pupuk bersubsidi, kelancaran distribusi input, dan transparansi harga TBS. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan produksi serta penguatan kelembagaan pemasaran petani juga diperlukan guna menekan biaya angkut, meningkatkan efisiensi usaha tani, dan memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi fluktuasi harga

## DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, Z., Napitupulu, D., Ernawati, Y. M., & Fauzia, G. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi harga TBS petani sawit swadaya di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 22(2), 101–112. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v22i2.8707>
- Ambarwati, N. Y., Napitupulu, D., & Yanita, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam melaksanakan peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Agribusiness and Local Wisdom (JALOW)*, 4(1), 15–25.
- Ardelia, S. M., Nainggolan, S., & Fitri, Y. (2026). Analisis daya saing komparatif dan kompetitif usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 5424–5434.
- Aznur, T. Z. (2021). Analisis daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas kelapa sawit rakyat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 69–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2034>
- Farita, N., Tarumun, S., & Rifai, A. (2021). Analisis daya saing kelapa sawit di Kabupaten Kampar. *Jurnal Agribisnis*, 23(1), 73–81.
- Fitri, Y., & Nainggolan, S. (2023). Analysis of technical efficiency and socio-economic factors influencing the development of smallholder oil palm plantations in Batanghari Regency. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10(6), 451–466.
- Gittinger, J. (1986). *Analisis ekonomi proyek-proyek pertanian* (Terjemahan). UI Press.

- Heckscher, E., & Ohlin, B. (1933). *Interregional and international trade*. Harvard University Press.
- Hendrawan, D., Chrisendo, D., & Musshoff, O. (2024). Strengthening oil palm smallholder farmers' resilience to future industrial challenges. *Scientific Reports*, 14(1)(12105), 11. <https://share.google/QCYnVbgzdO9Wn3QY2>
- Hermayanti, N. W., Abidin, Z., & Santoso, H. (2013). Analisis daya saing usahatani kelapa sawit di Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. *1(1)*, 44–52. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/130/134>
- Jawari, M., Muani, A., & Radian. (2017). Analisis daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Subah Kabupaten Sambah. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 6(1), 85–100.
- Junianto, R. (2025). An analysis of the impact of cultivation technology on the productivity of smallholder oil palm plantations. *Journal of Tropical Agro-Environmental*, 1(1), 11–17.
- Kadariah, K. L., & Gray, C. (2001). *Evaluasi proyek: Analisis ekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lifianthi, L., & Oktarina, S. (2021). Model komparatif penggunaan faktor produksi petani swadaya dan plasma pada usahatani kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Management Agribisnis (JIMANGGIS)*, 2(2), 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jimanggis.v2i2.69>
- Manik, S. A. P., Mardy, S., & Saputra, A. (2019). Analisis daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomi Bisnis*, 22(1), 116–127. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v22i1.8620>
- Martin, L., Wesgren, R., & Duren, E. V. (1991). *Agribusiness competitiveness across national boundaries*. American Agricultural Economic Association.
- Monke, E. A., & Pearson, S. R. (1989). *The policy analysis matrix for agricultural development*. Cornell University Press.
- Muharani, L., Priestiani, P., & Khasanah, N. (2024). Analisis penilaian perkebunan kelapa sawit swadaya berkelanjutan di Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(1), 315–327.
- Nainggolan, S., & Fitri, Y. (2024). Assessment of the efficiency of palm plantations using a stochastic frontier approach. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 10(1), 203–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.51599/are.2024.10.01.09>
- Napitupulu, D., Nainggolan, S., & Murdy, S. (2020). Kajian efisiensi teknis, sumber inefisiensi dan preferensi risiko petani serta menjaminkannya pada upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit di provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis dan Kearifan Lokal*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jalow.v3i2.11614>
- Ningsih, V. Y., Heriyanto, N., Noviyanto, & Wahyuni, N. (2019). Keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif usahatani kelapa sawit pada lahan suboptimal di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Agribisnis*, 20(2), 50–62.
- Nurjanah, D., Ambarsari, A., & Anwar, M. F. (2022). Kinerja petani swadaya kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. *Agri-tech*, 24(2), 161–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/agritech.v24i2.14117>

- Pearson, S., Gotsch, C., & Bahri, S. (2005). *Aplikasi policy analysis matrix pada pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Sartika, L., Nainggolan, S., & Saputra, A. (2025). Competitiveness analysis of smallholder oil palm farming in Rimbo Ilir District, Tebo Regency. *Jurnal Agriment*, 10(2), 237–250. <https://doi.org/10.51967/jurnalagriment.v10i2.3542>
- Sianturi, E. N., Nainggolan, S., & Elwamendri. (2021). Analisis daya saing usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. 52–58.
- Simanjuntak, S. B. (1992). *Analisis daya saing dan dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap daya saing perusahaan kelapa sawit Indonesia*.
- Soetriono. (2017). *Daya saing pertanian dalam tinjauan analisis*. Intimedia.
- Sukarman, S., Saidy, A. R., Rusmayadi, G., Adriani, D. E., Primananda, S., & Suwardi. (2024). Dynamics of oil palm yield productivity: Varieties and soil types as determining factors. *Journal of Agriculture and Forest Meteorology*, 3(1), 1–15.
- Syabawaihi, S., Primalasari, I., & Octalia, V. (2025). Analisis kelayakan finansial usahatani kelapa sawit swadaya murni di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 9(1), 45–57. <https://share.google/JjwaytoBWmWJngFj>
- Triningsih, C., Hadi, S., & Dewi, N. (2024). Kesiapan percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya Provinsi Riau. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 8(2), 337–347. <https://doi.org/10.36355/jas.v8i2.1718>
- Varina, F. S. T., Hartoyo, S., Kusnadi, N., & Rifin, A. (2021). Technical efficiency of independent oil palm smallholder in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1). <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p04>
- Varwasih, M. W., Darjanto, A., & Hidayat, N. K. (2023). Integrasi pasar tandan buah segar (TBS) petani swadaya kelapa sawit Provinsi Jambi-Indonesia dengan crude palm oil (CPO) internasional. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 6(3), 793–805. <https://doi.org/10.37637/ab.v6i3.1461>
- Yanita, M., Saputra, A., & Fauzia, G. (2023). Studi pola kemitraan petani kelapa sawit swadaya pada koperasi Perkasa Nalo Tantan Kabupaten Merangin. *UMP Press*, 5, 242–250. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.729>